



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13298-13305

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Tahap-Tahap Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia, Dinamika Kependudukan, dan Pengangguran di Kabupaten Probolinggo

Deddy Junaedi¹, Tri Indah Wahyuni², Nuril Masruroh³, Rica Rachmawati⁴, Lutfiyah Qilfa Khairil Aini⁵,
Siti Ayu Rustina⁶, Siti Nurhalisa⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Universitas Nurul Jadid

¹deddyjuna87@gmail.com, ²triindahwahyuni26@gmail.com, ³ricarachmawati7@gmail.com,
⁴nurilmasruroh221@gmail.com, ⁵gilfaqilfa76@gmail.com, ⁶finaismi7@gmail.com, ⁷ms.halisa03@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencakup peningkatan pembangunan manusia, dinamika demografi, serta kondisi pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahap-tahap pembangunan ekonomi dan pengaruhnya terhadap pembangunan manusia, dinamika kependudukan, serta pengangguran di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan data kuantitatif sebagai pendukung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori tahap-tahap pembangunan ekonomi Rostow, yang dihubungkan dengan indikator utama pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo masih berada pada fase transisi antara tahap pra-lepas landas dan tahap lepas landas pembangunan ekonomi. Kondisi ini tercermin dari dominasi sektor pertanian, terbatasnya perkembangan industri, serta lambatnya transformasi struktural menuju sektor manufaktur dan jasa modern. Meskipun IPM menunjukkan peningkatan secara bertahap, tingkatnya masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan di Jawa Timur, terutama akibat keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dari sisi demografi, dominasi penduduk usia produktif menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya lapangan kerja produktif dan tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Akibatnya, rendahnya tingkat pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang baik, karena masih disertai dengan rendahnya kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan transformasi struktural ekonomi guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Tahap Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Manusia, Dinamika Kependudukan, Pengangguran, Kabupaten Probolinggo

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata dapat diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus dievaluasi secara lebih menyeluruh melalui mutu pembangunan manusia. Pendekatan pembangunan modern menempatkan manusia sebagai sasaran utama, yang terlihat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup masyarakat. Konsep ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kapasitas suatu wilayah dalam memperluas pilihan hidup serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya (1)

Dalam sudut pandang ekonomi pembangunan, teori tahap-tahap pembangunan ekonomi memberikan kerangka analisis untuk memahami proses transformasi struktural perekonomian. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan berlangsung melalui fase tertentu, mulai dari kondisi ekonomi tradisional hingga perekonomian modern yang ditandai oleh industrialisasi, diversifikasi sektor, dan peningkatan produktivitas. Model tahap pembangunan yang diusulkan oleh Rostow menunjukkan bahwa setiap fase pembangunan memiliki karakteristik

Analisis Tahap-Tahap Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia, Dinamika Kependudukan, dan Pengangguran di Kabupaten Probolinggo

ekonomi dan sosial yang unik, yang selanjutnya berdampak pada struktur ketenagakerjaan dan kualitas sumber daya manusia (2)

Perbedaan tahap pembangunan ekonomi di berbagai wilayah berdampak langsung pada variasi kualitas pembangunan manusia. Wilayah yang berada pada tahap pembangunan yang lebih maju umumnya memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi, sejalan dengan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, wilayah yang masih berada pada tahap awal pembangunan cenderung menghadapi batasan dalam akses pendidikan dan kesehatan serta rendahnya standar hidup Masyarakat (3)

Di samping dampaknya terhadap pembangunan manusia, tahap pembangunan ekonomi juga memengaruhi pola demografis dan tingkat pengangguran. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap struktur usia populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta kemampuan wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Fenomena bonus demografi bisa menjadi peluang pembangunan jika didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun, tanpa adanya transformasi ekonomi yang inklusif, bonus demografi justru dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan kelompok usia produktif dan terdidik (4)

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah juga menghadirkan isu yang berpengaruh pada kesenjangan kualitas pembangunan manusia. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan disparitas IPM, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan pembangunan (5)

Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur menampakkan dinamika pembangunan yang menarik untuk diteliti. Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang rumit terhadap IPM di Kabupaten Probolinggo, baik secara parsial maupun simultan dengan variabel sosial ekonomi lainnya (6). Posisi Kabupaten Probolinggo dalam struktur pembangunan regional Jawa Timur menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis dengan pendekatan tahap-tahap pembangunan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tahap-tahap pembangunan ekonomi terhadap pembangunan manusia, dinamika kependudukan, dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian pembangunan ekonomi daerah serta menjadi acuan bagi formulasi kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan adil.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Walt W. Rostow

Teori tahap-tahap pembangunan ekonomi dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow, seorang ekonom Amerika Serikat, melalui karyanya *The Stages of Economic Growth*. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup perubahan struktur produksi, pola konsumsi, serta nilai sosial dan kelembagaan masyarakat. Dalam kerangka ini, pembangunan dipandang sebagai proses evolusioner yang berlangsung dalam jangka panjang dan dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya, teknologi, dan modal. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi ke dalam lima tahap utama, antara lain:

- a) Masyarakat tradisional, di mana kegiatan ekonomi didominasi oleh sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, penggunaan teknologi sederhana, tingkat pendidikan yang masih terbatas, serta struktur sosial yang cenderung statis.
- b) Pra-kondisi tinggal landas (*pre-take off*), yang ditandai dengan mulai terjadinya perubahan struktur ekonomi dan sosial. Pada tahap ini, pemerintah dan kelompok elit berperan dalam mendorong modernisasi melalui pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi yang lebih maju, serta peningkatan investasi di sektor-sektor produktif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
- c) Tinggal landas (*take off*), ditandai oleh peningkatan investasi yang signifikan, khususnya di sektor industri, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sektor manufaktur berkembang

pesat dan menjadi penggerak utama perekonomian, didukung oleh perubahan sosial dan kelembagaan yang semakin kondusif.

- d) Menuju kedewasaan (*drive to maturity*), di mana perekonomian telah mampu mengadopsi teknologi modern secara luas dan mengalami diversifikasi sektor ekonomi. Struktur ekonomi menjadi lebih kompleks, produktivitas meningkat, dan pertumbuhan pendapatan nasional berlangsung secara stabil dengan basis ekonomi yang semakin kuat.
- e) Masa konsumsi tinggi (*age of high mass consumption*), yang ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat. Fokus pembangunan tidak lagi semata pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, jaminan sosial, dan pemerataan kesejahteraan dalam struktur ekonomi yang relatif stabil dan maju.

Teori tahap-tahap pembangunan ekonomi Rostow memiliki relevansi dalam konteks negara berkembang karena menyediakan kerangka konseptual yang sistematis untuk memahami proses transformasi ekonomi dari struktur agraris menuju ekonomi industri dan jasa.

2. Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sudut pandang pembangunan yang menjadikan manusia sebagai sasaran utama dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai sarana produksi. Pendekatan ini muncul sebagai tanggapan terhadap paradigma pembangunan ekonomi konvensional yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, tanpa mempertimbangkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia mengutamakan peningkatan pilihan dan kemampuan dasar individu agar dapat hidup dengan baik, sehat, berpendidikan, dan produktif.

United Nations Development Programme (UNDP) memaknai pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas berbagai pilihan yang dimiliki manusia (*expanding people's choices*), khususnya kesempatan untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, mengakses pendidikan yang layak, serta menikmati taraf hidup yang memadai. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata dinilai dari capaian ekonomi, melainkan juga dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri serta berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep pembangunan manusia menurut UNDP menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu penguatan kapabilitas manusia seperti kesehatan dan pendidikan serta pemanfaatan kapabilitas tersebut dalam kegiatan yang produktif, kreatif, dan bernilai. Untuk menilai capaian pembangunan manusia secara kuantitatif, UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM telah digunakan secara luas oleh pemerintah maupun kalangan akademisi sebagai indikator gabungan yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan manusia di suatu wilayah. Indeks ini mencakup tiga dimensi pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

- a) Dimensi pendidikan dalam IPM merefleksikan kemampuan individu dalam memperoleh serta memanfaatkan pengetahuan. Pengukurannya didasarkan pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator tersebut menggambarkan sejauh mana sistem pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang ekonomi di masa mendatang.
 - b) Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta efektivitas layanan kesehatan dan kualitas lingkungan. Masyarakat dengan tingkat kesehatan yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, peningkatan derajat kesehatan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan.
 - c) Dimensi standar hidup layak dinilai berdasarkan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli. Indikator ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, serta akses terhadap layanan publik.
- ## 3. Dinamika kependudukan

Dinamika kependudukan menjadi salah satu unsur krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial, karena perubahan dalam jumlah, komposisi, serta kualitas penduduk berdampak langsung terhadap jalannya proses pembangunan. Penduduk tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai sumber daya utama yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi di suatu wilayah atau negara. Dalam konteks

negara berkembang, dinamika kependudukan kerap dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, proses transisi demografi, peluang bonus demografi, serta pergeseran struktur penduduk yang terjadi seiring dengan perkembangan tahapan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk mencerminkan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, serta arus migrasi. Pola kependudukan mengalami pergeseran secara bertahap dari pola kependudukan tradisional menuju pola yang lebih modern yang disebut proses transisi demografi. Transisi demografi memiliki dampak strategis terhadap pembangunan karena perubahan struktur umur akan memengaruhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan arah kebijakan publik. Salah satu konsekuensi penting dari transisi demografi adalah terjadinya bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Situasi ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan ekonomi, karena meningkatnya ketersediaan tenaga kerja dapat mendorong produktivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan nasional.

Namun demikian, bonus demografi tidak serta-merta memberikan keuntungan ekonomi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan iklim ekonomi yang mendukung. Tanpa kebijakan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban demografi, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran, setengah pengangguran, serta berbagai permasalahan sosial. Tantangan utama dalam pemanfaatan bonus demografi terletak pada sektor ketenagakerjaan, terutama ketika pertumbuhan angkatan kerja tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja juga menjadi hambatan serius.

4. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu persoalan sentral dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang yang sedang mengalami pergeseran struktur ekonomi. Dalam kerangka pembangunan, pengangguran tidak semata-mata mencerminkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, tetapi juga menggambarkan kemampuan proses transformasi ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Secara umum, pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan karakteristiknya, antara lain:

- a) Pengangguran terbuka merupakan kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini umumnya terjadi akibat keterbatasan kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, serta rendahnya daya serap tenaga kerja di sektor formal.
- b) Pengangguran struktural muncul sebagai akibat dari perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi. Dalam proses pembangunan, pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa sering kali menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak lagi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dan tuntutan sektor modern menjadi faktor utama terjadinya pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini cenderung bersifat jangka panjang dan memerlukan intervensi kebijakan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- c) Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang bersifat sementara dan terjadi dalam proses perpindahan tenaga kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Pengangguran ini muncul ketika individu membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian, minat, atau lokasi tempat tinggal. Dalam perekonomian yang terus berkembang, pengangguran friksional dipandang sebagai fenomena yang wajar dan mencerminkan adanya mobilitas tenaga kerja yang sehat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis yang diarahkan untuk memaparkan kondisi aktual sekaligus menelaah hubungan kausal antarvariabel. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama dengan dukungan data kuantitatif, seperti tren IPM dan TPT, yang mencerminkan penerapan mixed methods sebagaimana umum digunakan dalam studi ekonomi pembangunan di Indonesia untuk memperkuat validitas konseptual (7). Melalui pendekatan tersebut, dilakukan proses triangulasi antara kerangka teori tahap pembangunan, seperti model Rostow atau Lewis, dengan realitas empiris pada tingkat lokal.

Data penelitian bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo serta berbagai dokumen terkait yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menelusuri, mengakses, dan mengolah dokumen statistik, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sumber resmi dan akademik. RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk target pembangunan regional.

Analisis tematik digunakan untuk menghubungkan teori tahapan pembangunan ekonomi menurut Rostow dengan realitas empiris pembangunan manusia, yang tercermin dari nilai IPM Kabupaten Probolinggo sebesar 70,85 pada tahun 2024, dinamika kependudukan dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,8% per tahun, serta kondisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,00%. Metode analisis kualitatif, seperti pengkodean tematik, membantu peneliti mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan dalam data yang dihimpun (Irma Juliana et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan dan memahami fenomena secara lebih komprehensif. Penelitian kualitatif juga mampu mengungkap aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas konteks sosial, serta memungkinkan eksplorasi yang lebih luas atas perspektif individu.

Hasil dan Diskusi

1. Karakteristik dan Tahap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis agraris. Dengan luas wilayah sekitar 1.696,17 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,20 juta jiwa pada tahun 2024, yang menunjukkan potensi sumber daya manusia dan alam yang relatif besar. Aktivitas perekonomian Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah)

Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo masih berada dalam tahap transisi dari fase pertumbuhan awal menuju tahap pertumbuhan yang lebih dewasa, di mana transformasi struktural dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier belum berjalan dengan optimal. Akibatnya, percepatan pembangunan ekonomi yang signifikan belum sepenuhnya terwujud.

2. Struktur Perekonomian Daerah dan Transformasi Sektoral Secara struktural

Perekonomian Kabupaten Probolinggo masih sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Tapal Kuda yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyokong utama ekonomi daerah dengan kontribusi sekitar 31,75 persen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan dan jasa belum mengambil peran utama dan masih berfungsi sebagai sektor pendukung. Dari sudut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi struktur permintaan dengan kontribusi sebesar 70,52 persen. Pola ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo masih bergantung pada sektor primer dan konsumsi domestik, dengan tingkat diversifikasi ekonomi yang relatif terbatas.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transformasi struktural ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier masih bergerak lambat. Meskipun sektor industri pengolahan mulai berkembang, perannya belum cukup signifikan untuk menggeser dominasi sektor pertanian. Dalam perspektif teori tahapan pembangunan ekonomi Rostow, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, rendahnya industrialisasi, serta

keterbatasan investasi produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo masih berada pada tahap pra-kondisi lepas landas atau mendekati tahap lepas landas (Rostow, 1960). Ketergantungan terhadap sektor pertanian menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat proses menuju tahap lepas landas yang ditandai oleh pertumbuhan industri dan peningkatan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

3. Dampak Tahap Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia

Tahap pembangunan ekonomi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan manusia di kabupaten probolinggo. Struktur ekonomi yang berbasis pertanian umumnya berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah, terutama dalam aspek pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Keterbatasan diversifikasi sektor ekonomi mengakibatkan sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor dengan produktivitas rendah, sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi kunci penting untuk mendukung proses transformasi ekonomi.

Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 mencapai 71,65, meningkat dari 70,85 pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 1,13 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, meskipun laju peningkatannya masih relatif terbatas. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan di Jawa Timur, capaian IPM Kabupaten Probolinggo masih tertinggal, seperti terlihat pada IPM Kota Probolinggo yang mencapai sekitar 77,79 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo 2024). Kesenjangan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya indeks pendidikan Kabupaten Probolinggo yang masih berada di kelompok bawah di Jawa Timur, mencerminkan masalah akses dan kualitas pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan (8)

4. Dinamika Kependudukan dalam Proses Pembangunan Ekonomi

Tahap pembangunan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia tersebut juga berimplikasi pada dinamika kependudukan. Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo yang terus meningkat, bersamaan dengan dominasi penduduk usia produktif, mencerminkan potensi bonus demografi yang cukup besar. Rasio ketergantungan yang relatif rendah secara teori memberikan peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka teori Rostow, kondisi demografis ini seharusnya menjadi modal penting bagi daerah yang sedang bergerak dari tahap pra-kondisi lepas landas menuju tahap lepas landas, asalkan didukung oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja di sektor produktif.

5. Tahap Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Pengangguran

Potensi bonus demografi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang masih didominasi sektor primer dan terbatasnya sektor industri dan jasa modern menyebabkan kemampuan penyerapan tenaga kerja produktif menjadi terbatas. Data ketenagakerjaan BPS menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal, sementara penyerapan tenaga kerja formal relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang diharapkan pada tahap lepas landas, khususnya melalui industrialisasi dan pengembangan sektor modern, belum berjalan dengan optimal.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi tersebut tercermin pada dinamika pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Probolinggo tercatat sebagai salah satu yang terendah di Jawa Timur, yaitu peringkat ke-6 terendah dari 38 kabupaten/kota. Rendahnya TPT ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang ideal, karena lebih disebabkan oleh tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor informal dan sektor berproduktivitas rendah. Dengan demikian, meskipun sebagian besar angkatan kerja telah bekerja, kualitas pekerjaan dan tingkat produktivitas tenaga kerja masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah(9). Struktur pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor industri pengolahan dan jasa modern mengakibatkan keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja lokal di sektor formal, sekaligus memperlambat proses perluasan sektor modern. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, proses akumulasi modal dan peningkatan produktivitas yang diharapkan pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi akan sulit dicapai.

6. Keterkaitan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Pengangguran dalam proses Pembangunan ekonomi

Keterkaitan antara pengembangan manusia, dinamika demografi, dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo menciptakan sebuah siklus struktural dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja membatasi potensi daerah untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan aktivitas berproduktivitas rendah mengakibatkan permintaan untuk tenaga kerja terampil relatif sedikit, sehingga dorongan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan bertumpu pada kelemahan. Keadaan ini membentuk umpan balik negatif, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia memperlambat transformasi struktural ekonomi, sedangkan lambatnya transformasi ekonomi kembali menghalangi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Predominansi populasi usia produktif seharusnya menjadi modal signifikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan bonus demografi. Namun, terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan lapangan kerja produktif yang sempit membuat potensi tersebut tidak sepenuhnya tergal. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa modern mengarahkan tenaga kerja ke sektor informal dan sektor berproduktivitas rendah. Akibatnya, peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak secara otomatis meningkatkan produktivitas agregat atau pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menimbulkan masalah setengah pengangguran dan rendahnya kualitas pekerjaan. Kondisi ini tercermin dalam rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak dapat ditafsirkan sebagai pencapaian substansial pasar tenaga kerja, karena sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya pengangguran tersembunyi dan underemployment, yang secara struktural menghalangi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akumulasi modal manusia. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, tenaga kerja yang terserap tidak mampu menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah.

Kesimpulan

Ekonomi Kabupaten Probolinggo masih berada dalam fase transisi dari kondisi pra-lepas landas menuju tahap lepas landas, terlihat dari dominasi sektor pertanian dan lambatnya perpindahan menuju sektor industri pengolahan dan jasa modern. Situasi ini berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia yang meskipun menunjukkan perbaikan, masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah urban, terutama disebabkan oleh keterbatasan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Di sisi lain, dominasi populasi usia produktif menunjukkan potensi bonus demografi yang signifikan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya lapangan kerja yang produktif, sehingga rendahnya tingkat pengangguran lebih mencerminkan tingginya serapan tenaga kerja di sektor informal dan berproduktivitas rendah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo membutuhkan kebijakan terpadu yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor industri serta jasa modern untuk mendorong transformasi struktural ekonomi yang berkelanjutan.

Referensi

1. Anwar A, Tolosang K, Rorong I. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *J Berk Ilm Efisiensi*. 3ad;23(6):85–96
2. Atik Yulianti. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Periode Tahun 2010-2019. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2022). Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo menurut lapangan usaha.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2025). Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo tahun 2025.
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2025). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2024.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (n.d.). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Probolinggo: BPS.
7. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. (2024). Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Probolinggo tahun 2024.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur.
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur: BPS.
10. Efendi, Bakhtiar Dkk. (2024). TEORI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Dan Pertumbuhan Ekonomi. Tahta Media Group.
11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo 2023;(02):1–6.
12. Bps-Jawa Barat-Ipm. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Barat Tahun 2025;(27):1–12. Available From: <https://jabar.bps.go.id/Id/Pressrelease/2025/11/05/1248/Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Jawa-Barat-Tahun-2025-Mencapai-75-90--Meningkat-0-98-Poin-Atau-1-31-Persen-Dibandingkan-Tahun-Sebelumnya-Yang-Sebesar-74-92-.Html>
13. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Kota Semarang 2024;(24):1–9. Available From: <https://pustakadata.semarangkota.go.id/Brs/Bps/226>
14. Bloom De, Khoury A, Kufenko V, Prettner K. (2021). Spurring Economic Growth Through Human Development: Research Results

- And Guidance For Policymakers. *Popul Dev Rev*;47(2):377–409 Najib Putri Rh, Yuliana I. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Mediasi Di Probolinggo. *Fair Value J Ilm Akunt Dan Keuang*;5(6):2691–700.
15. Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, & Wulan Fadillah. (2023). Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.436>
16. Kirana Ad, Nilasari A. (2025). The Effect Of Economic Growth Rate, Human Development Index, And Open Unemployment Rate On Poverty In East Java Province 2019-2023. *Formosa J Multidiscip Res*;4(3):1079–94.
17. Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
18. Ritonga, M. J., Putra, H., Arwanda, A., & Herlinda. (2025). Pendekatan Mixed Methods dalam Penelitian Ekonomi Syariah : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18536–18542. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>
19. Rostow Ww. Teori Rostow. (1960). *Stages Econ Growth A Non Communist Manif.*
20. *Sosial*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/Harmoni-Widyakarya.V1i2.436>
21. Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia The Effect of Population Age Structure on Economic Growth in Indonesia Pend Dan, P., & Terhadap, K. (2024). Pengaruh indeks pembangunan manusia , tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia (2014-2023). 5(1), 57–71.